

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penyerahan urusan di bidang kepariwisataan dalam meningkatkan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Bandung, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Dengan diserahkannya urusan kepariwisataan pada Kabupaten Bandung, maka dapat dilihat mengenai kesiapan dari daerahnya dalam mengembangkan, memelihara dan mengelola urusan-urusan kepariwisataan yang telah diserahkan.
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2007, Kabupaten Bandung dimekarkan menjadi Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Sehingga dari data kepariwisataan yang telah didapatkan dari tahun 2005, 2006, dan 2007. Maka pada tahun 2007 data kepariwisataan tentang urusan yang telah diserahkan, tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2005 dan 2006 karena jumlah jenis usaha yang ada di Kabupaten Bandung telah dibagi dengan Kabupaten Bandung Barat sesuai dengan batas wilayahnya.
3. Urusan-urusan yang telah diserahkan kepada Kabupaten Bandung dari data yang telah didapatkan dengan membandingkan jumlah jenis usaha yang ada pada tahun 2005, 2006, 2007. Bahwa pada tahun 2005 dan 2006 rata-rata terjadi peningkatan pada jumlah jenis urusan, kunjungan wisatawan, dan pendapatan asli daerah. Sehingga dapat terlihat adanya peningkatan

pembangunan dari urusan kepariwisataan Kabupaten Bandung setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Peningkatan Pembangunan dapat terlihat dengan adanya penambahan jumlah jenis usaha yang ada pada tahun 2005 dan 2006, dengan adanya penambahan yang terjadi baik dari jumlah jenis usaha, jumlah wisatawan, jumlah tenaga kerja, dan jumlah Pendapatan Asli Daerah maka merupakan indikasi terjadinya peningkatan Pembangunan Kepariwisata di Kabupaten Bandung. Meskipun peningkatan tersebut dilihat belum optimal dengan banyaknya jenis usaha dari urusan yang telah diserahkan yang tidak berjalan di Kabupaten Bandung.

4. Indikator keberhasilan dari pengembangan pariwisata satu daerah seringkali diukur dari keberhasilan dalam meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung. dengan membandingkan jumlah wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara pada tahun 2005 dan 2006 maka dapat terlihat adanya peningkatan dalam jumlah wisatawan yang berkunjung ke objek wisata dan akomodasi yang ada di Kabupaten Bandung. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan adanya penyerahan urusan di bidang kepariwisataan dilihat dapat meningkatkan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Bandung.
5. Hambatan-hambatan yang ada dalam meningkatkan pembangunan di Kabupaten Bandung adalah dari kelemahan intern, kekurangsiapan dalam melaksanakan otonomi daerah dan antisipasi terhadap arus globalisasi di segala bidang kehidupan. Kelemahan sektor pariwisata dapat dijumpai dalam hal manajemen, prasarana, dan sarana maupun sumberdaya manusia

pengelola, dan juga meliputi persebaran objek dan daya tarik wisata (ODTW) yang tidak merata, Manajemen pengelolaan ODTW yang belum profesional dan kepemilikan ODTW yang tidak jelas berakibat kepada pembinaan dan pelayanan yang tidak optimal.

B. Implikasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka terdapat beberapa Implikasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Kabupaten Bandung dalam guna untuk meningkatkan pembangunan kepariwisataan, yaitu :

1. Otonomi daerah menuntut untuk membuka selebar-lebarnya bagi setiap peluang kerjasama diantara stakeholder kebudayaan dan pariwisata baik diantara Pemerintah Provinsi dengan kabupaten/kota maupun masyarakat budaya dan pariwisata di Jawa Barat. Harapan, tuntutan dan aspirasi dari stakeholder kebudayaan dan kepariwisataan dapat terfasilitasi dan terakomodasikan, baik ditingkat provinsi maupun di kabupaten/kota di Jawa Barat.
2. Upayakan peningkatan pembangunan urusan yang telah diserahkan kepada Kabupaten Bandung dengan pengembangan pariwisata daerah lebih dilihat secara parsial, artinya banyak daerah yang mengembangkan pariwisatanya tanpa melihat, menghubungkan, dan bahkan menggabungkan Kabupaten tetangganya cenderung terjadi persaingan dan akhirnya akan berdampak buruk terhadap kualitas destinasi dan produk yang dihasilkan oleh sebab itu

perlu adanya pola pandang baru agar terintegritasi, senergis dan kompherensif.

3. Nomenklatur dinas sebaiknya dikembalikan menjadi Dinas Kepariwisataaan agar jelas tugas, pokok, fungsi dinas dalam membina urusan bidang kepariwisataaan dan meningkatkan kinerja Kepariwisataaan Kabupaten Bandung.
4. Sumber daya manusia pengelola kepariwisataaan baik pada instansi pemerintah atau usaha pariwisata agar lebih ditingkatkan pengelolaannya, keterampilan dan kemampuannya.
5. Pengelolaan ODTW perlu memperhatikan kerjasama dengan PERUM PERHUTANI Unit III Jabar Banten, mengingat hampir 62% ODTW alam milik PERUM PERHUTANI Unit III.